

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi dan Laporan Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengelola dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan keputusan. Definisi akuntansi dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah pengidentifikasian, pencatatan, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Berikut beberapa pendapat para ahli atau pihak-pihak yang terkait dengan perkembangan akuntansi sebagai berikut:

Menurut Charles T. Hongren, dan Walter T Harrison (2013:3) Akuntansi adalah sebagai berikut:

“Accounting is an information system that measures business activity, processes data into reports, and communicates results to decision makers”.

Menurut Waren, et.all (2014:3), mengemukakan pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Menurut Hery (2015:6), Pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan”

Menurut Sumarsan (2017:1), Pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasikan, mencatat transaksiserta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.

Sedangkan menurut Hartono dan Rahmi dalam Buku Pengantar Akuntansi (2018:2) Pengertian akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu seni (dikatan seni karena perlu kerapihan, ketelitian, kebersihan) pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan dengan cara yang baik dalam unit moneter atas transaksi-transaksi keuangan dan kejadian-kejadian lain sehubungan dengan keuangan perusahaab dan menafsirkan hasil-hasil pencatatan tersebut.”

Dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi adalah proses pencatatan, peringkasan, dan penggolongan suatu transaksi untuk menghasilkan informasi keuangan atau kondisi ekonomi perusahaan untuk pihak internal ataupun eksternal.

2.1.1.2 Bidang-Bidang Akuntansi

Berikut macam-macam bidang akuntansi menurut Rahman Pura (2013) yang terdiri sebagai berikut :

1. Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
Bidang ini berkaitan dengan akuntansi entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak diluar perusahaan. Laporan yang berhasil ini bersifat serba

guna (*general purpose*) kegiataanya meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan.

2. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)
Akuntansi pemeriksaan adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Dalam pemeriksaan akuntansi keuangan (*auditing*), dilaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan keuangan. Salah satu tujuan akuntansi pemeriksaan adalah seperti ketaatan terhadap kebijakan, prosedur serta menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan. Dalam konsep tersebut, yang mendasari *auditing* adalah objektivitas dan independensi dari pemriksa serta kerahasiaan dan pengumpulan bukti-bukti yang terbilang cukup relevan.
3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
Bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Bidang ini menekankan sebuah penetapan dan sebuah kontrol atas biaya. Akuntansi biaya akan mengarah pada penetapan biaya berdasarkan aktivitas (*activity based costing*).
4. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
Akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Beberapa kegunaan akuntansi manajemen yaitu untuk mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas dan meilai alternatif dalam pengambilan sebuah keputusan.
5. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)
Akuntansi Perpajakan adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Kegiatan akuntansi perpajakan berfungsi membantu manajemen dalam menentukan pilihan-pilihan transaksi yang akan terjadi yang berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan perpajakan.
6. Akuntansi Peranggaran (*Budgeting*)
Peranggaran merupakan bidang akuntansi yang menyusun anggaran baik pendapatan maupun biaya. Bidang ini berhubunga dengan penyusunan rencana keuangan yang terkait dengan kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang serta analisis dan pengawasannya.
7. Akuntansi Pemerintah (*Governmental Accounting*)
Akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Bidang yang menyajikan sebuah laporan keuangan, pengendalian dan pengawasan keuangan negara. Akuntansi pemerintah diharapkan dapat mengatur administrasi keuangan negara dengan baik.
8. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)
Sistem akuntansi merupakan bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi agar

aman, efektif dan efisien Mulai dari organisir dokumen sampai menyusun produser pencatatannya.

9. Akuntansi Anggaran (*Budgetary Accounting*)

Akuntansi anggaran keuangan adalah jenis akuntansi yang kegiataanya berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data operasi keuangan yang sudah terjadi, serta taksiran kemungkinan yang akan terjadi untuk kepentingan penetapan rencana operasi keuangan operasi (anggaran) dalam suatu periode tertentu.

10. Akuntansi Sektor Publik

Sebagai akuntansi dan masyarakat yang diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya.

11. Akuntansi Pendidikan

Bidang khusus yang mengarah ke bidang pendidikan. Kebijakan yang berupa desentralisasi pendidikan diyakini dapat meningkatkan efisiensi, relevansi, pemerataan dan mutu pendidikan serta memenuhi asas keadilan demokratisasi.

12. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik sebagai akuntansi dana masyarakat yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya.

2.1.1.3 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bisnis. Sebagai laporan kinerja perusahaan dalam periode tertentu, data-data ini membantu akuntan dalam mengetahui secara pasti kondisi keuangan perusahaan. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan sekarang pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi).

Menurut Kasmir (2016), “Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Arief Sugiono dan Edi Untung (2016), “Laporan keuangan adalah hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan

kondisi keuangan dari hasil operasi suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”.

Menurut Irham Fahmi (2017), “Laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan kinerja suatu perusahaan”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu.

2.1.1.4 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Jenis laporan keuangan menurut Kasmir (2014) secara umum ada 5 jenis laporan keuangan yang di susun yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, laporan catatan atas laporan keuangan.

Laporan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Neraca
Neraca (*balance sheet*) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Artinya dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.
2. Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi (*income statement*) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Di dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian tergambar juga jumlah biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Dari jumlah pendapatan dan jumlah biaya ini terdapat selisih yang disebut laba atau rugi.
3. Laporan Perubahan Modal
Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan.

4. Laporan Arus Kas
Laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan kas terdiri arus kas masuk (*cash in*) dan arus kas keluar (*cash out*) selama periode tertentu. Kas masuk terdiri dari uang yang masuk ke perusahaan seperti hasil penjualan atau penerimaan lainnya. Sedangkan kas keluar merupakan sejumlah pengeluaran dan jenis-jenis pengeluaran seperti pembayaran biaya operasional perusahaan.
5. Laporan Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jenis-jenis laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan.

2.1.2 Ruang Lingkup Akuntansi Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi. Istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah pembukuan atau pencatatan. Tetapi karena sistem pajak yang ditetapkan pemerintah saat ini sebuah lembaga atau badan usaha diharuskan untuk menerapkan sistem akuntansi. Akuntansi perpajakan merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi perpajakan tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang ditur dalam UU perpajakan dan

pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

Menurut Setiawan, Agus (2012:8) bahwa akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk memepermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya”.

Menurut Sukrisno Agoes (2013:10) bahwa akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia”.

Menurut Waluyo (2014:35) Akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan–aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta laporan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak

penghasilan. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

2.1.2.2 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Konsep dasar Akuntansi Perpajakan menurut Sukrisno Agoes (2013:11) adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran dalam Mata Uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep kesinambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadi transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi, Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas, konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU Pph Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama.

2.1.3 Profitabilitas

2.1.3.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio utama dalam sebuah laporan keuangan perusahaan sebuah perusahaan, karena tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatkan laba yang maksimal. Profitabilitas diukur dengan kesuksesan

perusahaan dan kemampuan dalam menggunakan asetnya secara produktif, oleh karena itu profitabilitas sebuah perusahaan bisa diketahui dengan cara membandingkan antara laba yang didapat dengan jumlah asset atau modal perusahaan. Profitabilitas ini menggambarkan seberapa efektifnya perusahaan beroperasi dalam memperoleh keuntungan. Profitabilitas sebuah perusahaan bisa diukur dengan menggabungkan antara keuntungan atau laba yang didapatkan dari kegiatan operasional perusahaan dengan kekayaan atau asset yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan perusahaan (*operating asset*). Sehingga profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur investor maupun kreditor dalam penilaian kinerja perusahaan.

Rasio Profitabilitas sering digunakan tidak hanya untuk manajemen operasional, tetapi juga untuk pengambilan keputusan investor dan kreditor. Para investor di pasar modal sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan *profit*, hal ini menjadi daya tarik bagi investor dalam melakukan jual beli saham, oleh karena itu manajemen harus mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian profitabilitas antara lain:

Menurut Munawir (2014), profitabilitas adalah:

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau keuntungan selama periode tertentu”.

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2014) mendefinisikan profitabilitas adalah:

“Profitability ratio is a ratio that measures the success or operation of a company for a certain period of time”

Menurut Irhan Fahmi (2015:81), mendefinisikan profitabilitas sebagai berikut:

“Rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan”.

Menurut Hery (2016:192) profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya”.

Menurut Kasmir (2019:11), profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau laba dalam jangka waktu yang tertentu”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur seberapa besar sebuah perusahaan mampu menghasilkan laba dengan menggunakan semua faktor perusahaan yang ada didalamnya untuk menghasilkan laba yang maksimal. Rasio profitabilitas ini yang biasanya dijadikan bahan pertimbangan seorang investor dalam menanamkan sahamnya disuatu perusahaan. Bila suatu perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi terhadap pengembalian saham, maka seseorang investor akan memilih perusahaan tersebut untuk menanamkan sahamnya.

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Dalam upaya untuk mencapai tujuan itu perusahaan harus dapat beroperasi secara lancar dan dapat mengkombinasikan semua sumber daya yang ada, sehingga

dapat mencapai hasil dan tingkat laba yang optimal. Namun tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari kegiatan operasionalnya tidaklah selalu berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Manfaat rasio profitabilitas tidak terbatas hanya pada pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

“Menurut Kasmir (2013:197) menjelaskan terdapat beberapa tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan yakni:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri”.

Sementara itu, manfaat dari rasio profitabilitas adalah:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

“Menurut Hery (2016:192) tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan yaitu:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.

4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih”.

Rasio profitabilitas dinilai sangat penting, karena untuk melangsungkan hidup suatu perusahaan haruslah berada dalam keadaan menguntungkan atau *profitable*. Tanpa keuntungan maka suatu perusahaan akan sulit untuk menarik modal dari luar. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan sekaligus mencari perubahan tersebut. Semakin lengkap jenis rasio yang digunakan, semakin sempurna hasil yang akan dicapai artinya posisi dan kondisi tingkat profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna.

2.1.3.2 Metode Pengukuran Rasio Profitabilitas

Menurut R. Agus Sartono (2012:113) terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. *Return On Assets (ROA)*
Return On Assets (ROA) Merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini diitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. *ROA* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

2. *Return On Equity (ROE)*

Return On Equity adalah rasio yang menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham dan merupakan alat yang paling sering digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi. *Return On Equity* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal}}$$

3. *Gross Profit Margin*

Gross Profit Margin menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. *Gross Profit Margin* merupakan ukuran efisiensi perasi perusahaan dan juga penetapan harga produk. Apabila harga produk meningkat maka *Gross Profit Margin* akan menurun, begitu juga sebaliknya. Semakin besar rasio *Gross Profit Margin*, maka akan semakin baik keadaan operasi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa *cost of good sold* relatif rendah dibandingkan dengan penjualan. Rumus perhitungan *GPM* adalah sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}}$$

4. *Net Profit Margin*

Net Profit Margin adalah ukuran profitabilitas perusahaan dari penjualan setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan. Rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya. *Net Profit Margin* sering digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam mengendalikan beban-beban yang berkaitan dengan penjualan. Semakin tinggi net profit margin dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

5. *Operating Profit Margin*

Operating Profit Margin menggambarkan “*Pure Profit*” yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. Semakin tinggi rasio *operating profit margin*, maka semakin baik pula operasi suatu perusahaan. *Operating profit margin* dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Penjualan}}$$

Dalam penelitian ini, alat ukur profitabilitas yang akan digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan rasio *Return On Assets (ROA)*, karena *ROA* menunjukkan hasil *return* yang diperoleh perusahaan atas total aktiva yang digunakan. Selain itu *ROA* memperhitungkan bagaimana kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh laba. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan *ROA* menunjukkan kemampuan atas modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Rasio *ROA* ini sering digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dan menilai kinerja operasional dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, disamping perlu mempertimbangkan masalah pembiayaan terhadap aktiva tersebut (Sari, 2013).

2.1.4 Leverage

2.1.4.1 Pengertian Leverage

Leverage merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset atau modal yang memiliki biaya tetap (hutang atau saham) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang bersangkutan. Setiap perusahaan dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan operasionalnya sehari-hari pasti membutuhkan modal yang menjadi salah satu pondasi utama. Modal tersebut berasal dari modal sendiri maupun modal yang berasal dari pinjaman. Modal tersebut dapat berasal dari dua sumber utama, yaitu berasal dari ekuitas dan *leverage*.

Istilah *leverage* biasanya dipergunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai

beban tetap (*fixed cost assets or funds*) untuk memperbesar penghasilan (*return*) bagi pemilik perusahaan. Dengan memperbesar tingkat leverage maka hal ini berarti bahwa tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) dari return yang akan diperoleh akan semakin tinggi pula, tetapi pada saat yang sama hal tersebut juga akan memperoleh jumlah return yang akan diperoleh. Semakin tinggi tingkat *leverage* akan semakin tinggi resiko yang dihadapi serta semakin besar tingkat return atau penghasilan yang diharapkan. Ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai pengertian *leverage* sebagai berikut:

Menurut Irham Fahmi (2012:127) mendefinisikan rasio *leverage* sebagai berikut:

“Rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrim) yaitu perusahaan dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban hutang tersebut”.

Menurut Kasmir (2013:151) menyatakan rasio *leverage* adalah sebagai berikut:

“*Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana ekuitas perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan ekuitasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi)”.

Menurut Keiso, Weygant, dan Warfield (2014:213) mendefinisikan rasio *leverage* sebagai berikut:

“*Ratio leverage is rasio that measures of degree of protection for long-term creditors and investors*”

Menurut Harahap (2015:306) mendefinisikan *leverage* sebagai berikut:

“Rasio *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan yang dibiayai oleh kewajiban atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh ekuitas. Setiap penggunaan utang oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap rasio dan pengembalian. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat seberapa resiko keuangan perusahaan”

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *leverage* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek dengan membandingkan ekuitas yang dimilikinya. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrim) yaitu perusahaan dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban hutang tersebut.

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Dalam melakukan *leverage* tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Mengacu pada setiap definisinya. Menurut Kasmir (2013:153) terdapat beberapa tujuan perusahaan menggunakan *leverage*, yaitu:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor) .
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva”.

Sementara itu, manfaat rasio *leverage* menurut Kasmir (2013:154) adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besra aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagia dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimilikinya.

2.1.4.3 Jenis-Jenis Pengukuran Rasio *Leverage*

Menurut J.Fred Weston dan Thomas E. Copeland (2011:242) terdapat beberapa jenis rasio *leverage* yang biasa dimanfaatkan oleh perusahaan, diantaranya sebagai berikut:

1. *Debt to Total Assets Ratio*

$$\text{Debt to Total Assets Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}}$$

“Measures the percentage of total assets provided by creditors”

Keterangan:

-*Total Liabilities*: Total Utang

Debt to Assets Ratio merupakan rasio utang ang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang. Apabila *Debt to Asset Ratio* tinggi artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena perusahaan dikhawatirkan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya.

2. *Debt to Equity Ratio*

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

“*Measures the percentage of total equity provided by creditors*”

Keterangan:

-Total Equity: Total Ekuitas (Modal)

Rasio ini merupakan rasio yang mengukur tingkat hutang terhadap modal yang dimiliki perusahaan. *Debt to equity ratio* dapat mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya dengan modal (modal yang dimilikinya). Rasio ini juga mampu menilai kemampuan perusahaan untuk menggunakan modal yang berasal dari pinjaman dalam menunjang kegiatan perusahaan terutama untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin tinggi *debt to equity ratio* suatu perusahaan maka semakin tinggi hutang yang dimiliki perusahaan.

3. *Times Interest Earned Ratio*

$$\text{Times Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Income Before Interest Expenses and Tax}}{\text{Interest Expense}}$$

Keterangan:

- *Income Before Interest Expenses and Tax*: Laba Sebelum Bunga dan Pajak
- *Interest Expense*: Beban Bunga

Rasio ini merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar kemungkinan perusahaan dapat bunga pinjaman dan dapat menjadi ukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru dari kreditor”.

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan rumus dari *Debt to Equity Ratio* untuk menghitung *leverage*. *Debt to Equity Ratio (DER)* merupakan rasio yang mengukur tingkat hutang terhadap modal yang dimiliki perusahaan. *Debt to Equity Ratio* dapat mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya dengan modal (modal yang dimilikinya). Rasio ini juga mampu menilai kemampuan perusahaan untuk menggunakan modal yang berasal dari pinjaman dalam menunjang kegiatan perusahaan terutama untuk meningkatkan

laba perusahaan. Semakin tinggi *Debt to Equity Ratio* suatu perusahaan maka semakin tinggi hutang yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan lebih memilih untuk menutupin hutangnya dibanding membagikan dividen.

2.1.5 Sales Growth

2.1.5.1 Pengertian Sales Growth

Sales growth (pertumbuhan penjualan) adalah peningkatan penjualan dalam suatu bisnis dijangka waktu tertentu. Pengukurannya adalah dengan membandingkan tingkat penjualan saat ini dengan tingkat penjualan sebelumnya. Hal ini sangat penting untuk perusahaan dapat membuat keputusan bisnis yang sesuai untuk keberhasilan dan daya tahan kedepannya. Berikut adalah pengertian *Sales Growth* menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Kasmir (2016:107) mengemukakan *sales growth* adalah sebagai berikut:

“Pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan”.

Pengertian *Sales Growth* menurut Subramanyam (2014:487) adalah sebagai berikut:

“Analysis of trends in sales by segments is useful in assessing profitability. Sales growth is often the results of one or more factors, including (1) price changes, (2) volume changes, (3) acquisitions/divestitures, and (4) changes in exchange rates. A company’s Management’s Discussion and Analysis section usually offers into the cause of sales growth”.

Menurut Swastha dan Handoko (2011:98) *sales growth* adalah sebagai berikut:

“Merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan jasa perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan”.

Berdasarkan definisi di atas sampai pada pemahaman penulis bahwa *Sales Growth* (Pertumbuhan Penjualan) menggambarkan peningkatan penjualan dari tahun ke tahun dan menggambarkan tingkat profitabilitas perusahaan. Tingginya tingkat *Sales Growth* menunjukkan semakin baik suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya. Pertumbuhan penjualan sering menggambarkan keberhasilan suatu perusahaan.

Sales growth sering mencerminkan keberhasilan suatu perusahaan. Menurut Tambunan (2013:214), pertumbuhan penjualan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan profit. Variabel pertumbuhan penjualan didasarkan pada argument bahwa pertumbuhan penjualan mencerminkan tingkat produktivitas terpasang yang siap beroperasi serta mencerminkan kapasitas saat ini yang dapat diserap pasar dan mencerminkan daya saing perusahaan dalam pasar. Pertumbuhan perusahaan menjadi sebuah indikator untuk daya saing perusahaan dalam industri. Pertumbuhan perusahaan akan mempengaruhi kemampuan untuk mendapatkan untung dan mempertahankan untung untuk mendanai investasi di masa yang akan datang. Apabila pertumbuhan penjualan meningkat berarti kinerja yang dilakukan oleh perusahaan menjadi lebih baik.

2.1.5.2 Metode Pengukuran *Sales Growth*

Menurut Kasmir (2016:107) rasio *sales growth* ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Net Sales Growth Ratio} = \frac{\text{Net Sale}_t - \text{Net Sale}_{t-1}}{\text{Net Sale}_{t-1}}$$

Keterangan:

- Net Sales_t : Penjualan bersih perusahaan pada tahun t
- Net Sales_{t-1} : Penjualan bersih perusahaan pada tahun t-1

Pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut berhasil menjalankan strateginya dalam hal pemasaran dan penjualan produk.

2.1.6 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

2.1.6.1 Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Sukirno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:6) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban terhadap negara yang telah diatur oleh undang-undang harus

dibayarkan oleh wajib pajak yang tinggal di negara tersebut, pajak digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional agar mencapai kemakmuran rakyat.

2.1.6.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peran penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan nasional karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan negara. Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2014:3) adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
- b. Fungsi *Regulated* (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak sebagai sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran rutin, selain itu juga sebagai alat pengatur dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

2.1.6.3 Jenis-jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7) terdapat jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua:
 - a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaanya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya, Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaanya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis pajak dibagi menurut golongan dan sifatnya, pajak menurut golongan yaitu pajak yang ditanggung oleh pribadi atau dibebankan ke pihak ketiga. Sedangkan pajak menurut sifat yaitu pajak yang memerlihatkan keadaan subjek atau objeknya.

2.1.6.4 Beban Pajak

Merujuk dari PSAK Nomor 46 Paragraf 5 dan 6, beban pajak (Penghasilan pajak) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba-rugi pada suatu periode. Beban pajak (penghasilan pajak) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada suatu periode dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan) adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa beban pajak merupakan jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan berdasarkan periodenya dalam satu periode atau periode mendatang.

2.1.6.5 Manajemen Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara. Namun, bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang harus ditanggung perusahaan. Beban pajak bagi perusahaan merupakan pengurang bagi laba. Sedangkan tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, perusahaan mencari upaya untuk meminimalkan beban pajak, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. (Pohan 2013:3).

Menurut Pohan (2016:13) manajemen perpajakan adalah:

“Usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal.

Menurut Pohan (2016:10) strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu:

1. Penghematan Pajak (*tax saving*)
2. Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)
3. Penundaan pembayaran pajak
4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkirakan
5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar
6. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku”.

Berdasarkan pengertian diatas strategi dalam mengefesiensikan beban pajak secara legal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

2.1.6.6 Pengertian *Tax Avoidance*

Menurut Budiman dan Setiyono (2012) pengertian *Tax Avoidance* adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang atau aturan lain yang berlaku. *Tax Avoidance* dapat diukur menggunakan *CETR* yaitu dengan membagi kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak”.

Menurut Robert H Anderson (2010:147) menjelaskan bahwa:

“Tax Avoidance is a way of reducing taxes that are still within the limjits of the provisions of taxation legislation and can be justified mainly through tax planning”.

Menurut Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013:4) *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Menurut Pohan (2016:23) *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

“Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Menurut Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013:5) *tax avoidance*

(penghindaran pajak) dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

1. Menahan Diri
Wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak, seperti tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau, atau tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak/cukai atas pemakaian barang tersebut.
2. Pindah Lokasi
Memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.
3. Penghindaran Pajak secara Yuridis
Perbuatan ini dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang (*loopholes*).

Dari penjelasan mengenai *tax avoidance* diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang memiliki dampak terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam ketentuan perpajakan dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. Tekniknya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak.

Terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengatur *tax avoidance* yang umumnya digunakan dalam Hanlon dan Heitzman (2010), dimana disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pengukuran Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

No	Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide Total Income Tax Expense}}{\text{Worldwide Total Pre – Tax Accounting Income}}$	Total expense per dollar of pretax book income
2	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide Current Income Tax expense}}{\text{Worldwide Total Pre – Tax Accounting Income}}$	Current tax expense per dollar of pretax book income
3	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide Cash Income Tax Expense}}{\text{Worldwide Total Pre – Tax Accounting Income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax bppk income
4	Long-run Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide Income Total Tax expense}}{\text{Worldwide Total Pre – Tax Accounting Income}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over years
5	ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference of between the statutory Etr an firm's GAAP ETR
6	DTAX	Error Term from the Following Regression : $\text{ETR Differential} \times \text{Pre-Tax Book Income} = a + bx \text{ control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
7	Total BTD	$\text{Pre-Ta Book Income} - (((\text{U.S CTE} + \text{fgn CTE})/\text{U.S STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1}))$	The total difference between book and taxable income
8	Temporary BTD	Deferred Tax Expense/U.S STR	The total difference between book and taxable income
9	Abnormal Total BTD	Residual from $\text{BTDA}_{it} = \beta \text{TA}_{it} + \theta \text{mi} + \text{eit}$	A measure of unexplained total book-tax difference
10	Unrecognized Tax Benefits	Disclosed Amount Post – FIN48	Tax liability accrued for taxes not yet paid uncertain positions
11	Tax Shelter Activity	Inducator Variable For Firms Accused of Enggaging in a Tax Shelter	Firms identified via firm disclosures, the press, or IRS condfidential data
12	Marginal Tax Rate	Simulated Marginal Tax Rate	Present value of taxes on an additional dollar of income

Sumber: Hanlon & Heitzman (2010)

Menurut Budiman dan Setiyono (2012), variabel *tax avoidance* dihitung melalui *CETR* (*Cash Effective Tax Rate*) pada perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Rumus untuk menghitung *CETR* menurut Budiman dan Setiyono (2012) adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus *CETR* bertujuan untuk mengindikasikan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan. Alasan penelitian ini menggunakan rumus *CETR* ini menggambarkan penghindaran pajak perusahaan dengan pertimbangan bahwa semakin besar *Cash ETR* ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, *CETR* menggambarkan semua aktivitas *tax avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan dan *CETR* tidak terpengaruh dengan adanya perusahaan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak.

Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *Cash ETR* menurut Dyreng, et. al (2010) baik digunakan untuk

“Menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model *GAAP ETR*. Semakin kecil nilai *Cash ETR*, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya”.

Menurut PPh 17 ayat (2), tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia yang dimulai pada tahun pajak 2010-2019, tarif pajak penghasilan wajib badan ditetapkan 25%.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tarif PPh Badan untuk wajib pajak badan dari 25% turun menjadi 22%. Perusahaan dikategorikan melakukan penghindaran pajak apabila *cash effective tax rate* (CETR) kurang dari 25% dan apabila *cash effective tax rate* (CETR) lebih dari 25% dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak (Budiman dan Setiyono, 2012).

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Peneliti Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Kurniasih dan Sari	2013	Pengaruh <i>Return On Assets, Leverage, Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ROA, Ukuran Perusahaan, dan kompensasi rugi Fiskal berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>leverage</i> dan CG tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
2	I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suadarna	2014	Pengaruh <i>Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>corporate Governance</i> dan Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Karakteristik Eksekutif tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
3	I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha	2014	Pengaruh Terhadap <i>Corporate Governance, Leverage, Return On Assets</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>Corporate Governance, Profitabilitas</i> , dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
				<i>Tax Avoidance</i> sedangkan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
4	Calvin Singly dan I Made Sukartha	2015	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Komite Audit dan <i>Sales Growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
5	Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ	2016	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan <i>Leverage</i> , Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>Corporate Governance</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
6	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan	2016	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>Leverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, dan <i>Profitabilitas</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
7	I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana	2016	Pengaruh <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
8	Rezka Olva	2016	Pengaruh Profitabilitas	Hasil Penelitian

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
			dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	tersebut menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
9	Rusli Reinaldo	2017	Pengaruh <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Return On Assets</i> , Kepemilikan Institusional Kompensasi Kerugian Fiskal, dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>ROA</i> , Kompensasi Kerugian Fiskal, dan <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
10	Mayarisa Oktamawati	2017	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa Karakter Eksekutif, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan sumber penerimaan utama sekaligus menjadi yang paling penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Sesuai dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan “kontribusi wajib negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,

dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan, bagi perusahaan pajak adalah beban yang mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Perbedaan kepentingan Negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin.

Perbedaan kepentingan bagi negara dan bagi perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax Avoidance* merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013:13).

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu Profitabilitas, *Leverage* dan *Sales Growth* terhadap variabel dependen, yaitu *Tax Avoidance*. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Assets* (*ROA*). Pada penelitian ini *Return On Assets* (*ROA*) digunakan sebagai indikator untuk mengukur profitabilitas perusahaan.

Menurut Dendawijaya (2010:120) mengemukakan bahwa:

“*Return On Assets (ROA)* mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai *ROA* yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik dengan profitabilitas yang tinggi maka semakin tinggi kesempatan melakukan perencanaan pajak”.

Pernyataan tersebut didukung pula oleh Chen et.al (2013) sebagai berikut:

“*Firms with high profitability have the opportunity to position themselves in tax planning that reduces the amount of taxes*”.

Adapun hubungan profitabilitas dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) sebagai berikut:

“Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (*loopholes*) terhadap pengelolaan beban pajaknya”.

Selain itu, Dewi dan Setiawan (2016) menyatakan hubungan antara profitabilitas dengan *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

“Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah beban pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari jumlah beban pajaknya”.

Dari pernyataan diatas, Semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan, maka semakin tinggi nilai *ROA* yang berarti profitabilitas perusahaan semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak. (Kuriasih dan Sari 2013).

2.2.2 Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila

perusahaan memiliki kewajiban yang tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula dan munculnya biaya bunga, biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak (Surya, 2016).

Pernyataan tersebut didukung pula oleh Brigham dan Houtston (2014:155) menyatakan bahwa:

“Leverage ratio is the ratio that measures the extent to which the firm’s financial leverage must pay a fixed expense in the form of interest expense”.

Adapun hubungan *leverage* dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Nurfadilah (2014) sebagai berikut:

“Perusahaan yang memiliki nilai dari rasio *leverage* tinggi, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan”.

Hubungan antara *leverage* dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Christine Harrington et. al (2013) sebagai berikut:

“In the context of the dynamic trade leverage following a refinancing event, these results support the no avoiders value leverage as parts of an overall tax avoidance strategy, and are robust to alternative definitions of leverage, methods of refinancing event”.

Dari pernyataan diatas semakin tinggi nilai *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah perbedaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula beban bunga yang timbul dari utang tersebut. Akibatnya laba yang diperoleh perusahaan akan berkurang sehingga pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi lebih rendah. Beban yang rendah akan berdampak pada penghindaran pajak. (Dharma dan Ardiana).

2.2.3 Pengaruh *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Apabila pertumbuhan penjualan suatu perusahaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik. Jika tingkat penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya meningkat. Hal tersebut terjadi jika penjualan meningkat, maka akan meningkatkan laba sehingga berdampak pada semakin tingginya biaya pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan penghindaran pajak agar beban pajak perusahaan tidak tinggi (Mayasari Oktamawati, 2017).

Pernyataan tersebut didukung pula oleh pohan (2016:23) menyatakan bahwa:

“Peningkatan pertumbuhan penjualan secara tidak langsung akan meningkatkan laba. Perusahaan dengan laba yang besar cenderung akan melakukan perencanaan pajak dengan semaksimal mungkin sehingga dapat mengurangi pembayaran pajak kepada pemerintah”.

Adapun hubungan pertumbuhan penjualan dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) adalah sebagai berikut:

“Semakin besar penjualan maka semakin besar laba yang akan diperoleh perusahaan, sehingga laba yang dibebankan oleh perusahaan akan semakin besar dan semakin besar pula kesempatan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak”.

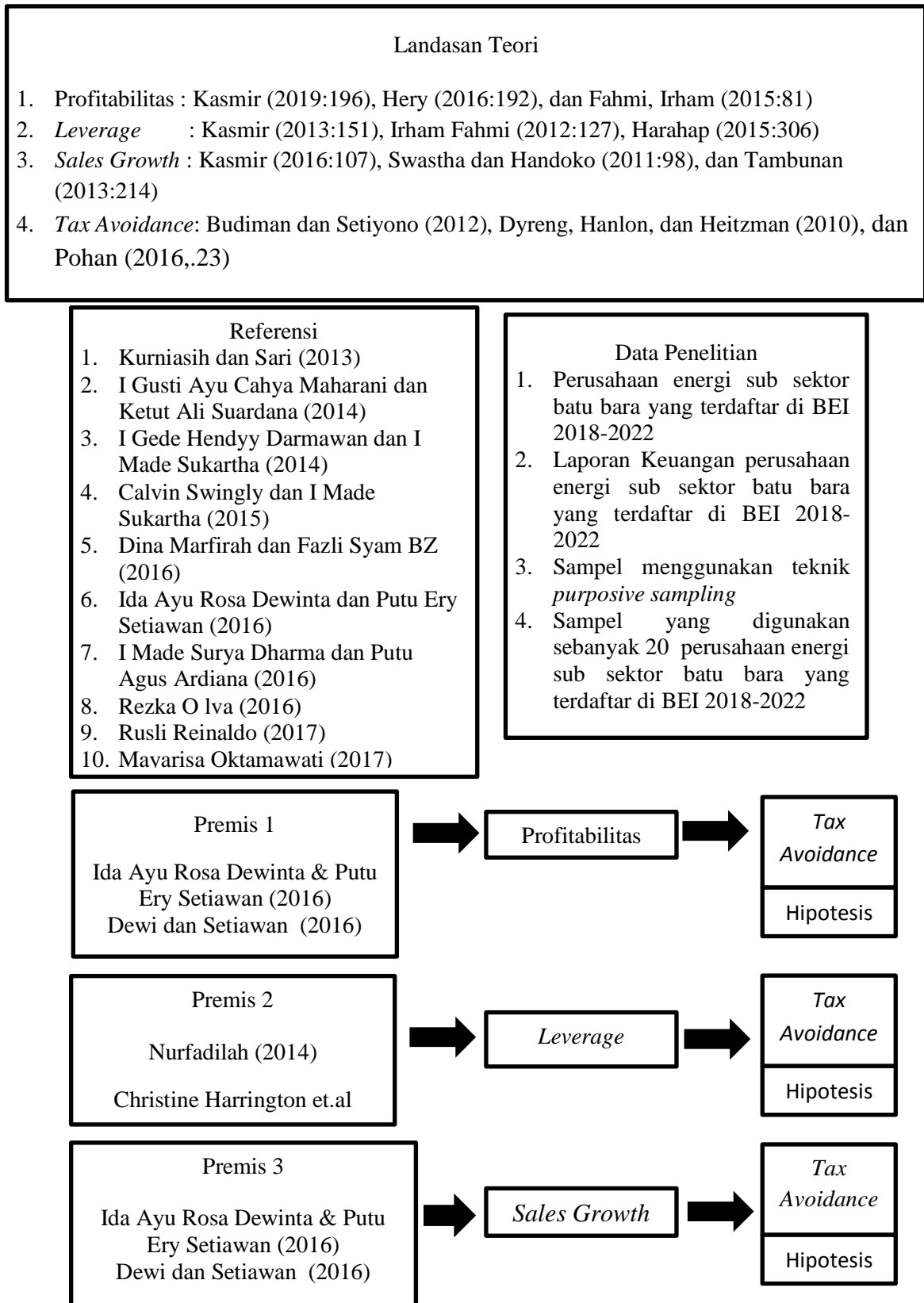
Selain itu, Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) menyatakan hubungan antara pertumbuhan penjualan dengan *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

“Pertumbuhan penjualan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan, karena dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, perusahaan akan memperoleh profit besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*, karena dengan profit yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula”.

Dari pernyataan diatas semakin besar volume penjualan suatu perusahaan menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan tersebut semakin meningkat. Apabila pertumbuhan penjualan meningkat, laba yang dihasilkan perusahaan diasumsikan mengalami peningkatan. Laba perusahaan mengalami kenaikan berarti pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan cenderung akan mekalukan penghindaran pajak (Deitiana 2011).

Dari pernyataan diatas profitabilitas, *leverage*, dan *sales growth* merupakan satu kesatuan yang ada dalam perusahaan yang semuanya merupakan faktor yang memiliki pengaruh penting untuk perkembangan perusahaan. Hubungan antar profitabilitas, *leverage* dan *sales growth* dengan *tax avoidance* berdasarkan riset sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak. (Kasit.B, 2016).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kerangka pemikiran dapat dilihat dalam gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:64) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik”.

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

$H_1 =$ Profitabilitas berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*.

$H_2 =$ *Leverage* berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*.

$H_3 =$ *Sales Growth* berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*.